

BAB VIII PENUTUP

Dari keseluruhan rangkaian penulisan disertasi ini akan diakhiri dengan penutup yang terdiri dari dua bagian besar yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Sedangkan saran merupakan masukan-masukan dari peneliti yang diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengkaji masalah yang serupa dengan disertasi ini.

8.1. Kesimpulan

Pemberlakuan otonomi khusus Papua telah berdampak luas pada berbagai tatanan dan kebijakan di Papua tidak terkecuali yang dirasakan oleh kaum migran di Kabupaten Jayapura. Penempatan posisi “keistimewaan”, baik status, perlakuan, maupun akses bagi Orang Asli Papua mengakibatkan tersegmentasinya masyarakat ke dalam dua kutub; Orang Asli Papua dengan segala pengistimewaan padanya dan etnis migran dengan segala bentuk ketiadaan akses yang dirasakan. Otonomi khusus ini pula secara langsung mempengaruhi penguasaan-penguasaan diantara sektor kehidupan yang menunjukkan adanya dominasi. Selama pemberlakuan otonomi khusus tersebut di atas hal ini yang menjadi modal kedua belah pihak yang terus dibangun untuk mencari pola relasi yang tepat walau terdapat banyak dinamika yang mengitari kedua pihak.

Dalam bidang sosial, relasi yang terbangun berada dalam kontestasi antar Orang Asli Papua dan migran di ranah publik untuk menunjukkan eksistensinya. Hak keistimewaan Orang Asli Papua yang didapatkan atas legitimasi otonomi khusus, sementara migran juga harus mempertahankan eksistensi diri dengan cara adaptasi diri. Migran mampu mengembangkan nilai-nilai baru dalam kehidupannya dengan menegosiasikan dirinya di tengah dinamika atau mereka berada pada tataran antara menahan diri

dan harga diri. Menahan diri karena mengerti posisi mereka dengan keadaan Papua hari ini dengan legitimasi otonomi khusus Papua terhadap Orang Asli Papua yang tidak ada pada mereka dan harga diri karena mereka datang bermigrasi ke Papua dengan segala resikonya disertai dengan prinsip-prinsip yang sudah mereka miliki.

Otonomi khusus ini pula secara langsung mempengaruhi penguasaan-penguasaan diantara sektor kehidupan. Kedua kelompok masyarakat tersebut terus mengalami segmentasi yang maknanya menegaskan adanya upaya yang direproduksi secara berkelanjutan dalam rangka mempertahankan kekuatan di satu sisi, dan menunjukkan penguatan identitas primordial di sisi lain. Pola relasi kedua kelompok masyarakat kemudian mengalami fluktuasi kondisi yang ditandai oleh semakin menguatnya ikatan-ikatan kelompok dan beragamnya pilihan strategi bagi masing-masing kelompok untuk mempertahankan kelompok. Migran Muslim dengan negosiasi diri sambil melakukan penguatan yang ada pada mereka seperti penguatan sumber daya (*human resources*) dengan mendirikan atau mengembangkan lembaga atau dengan yayasan pendidikan seperti yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam dan Muhammadiyah. Pilihan ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan eksistensi di tengah kuatnya segmentasi identitas antara migran dan Orang Asli Papua. Namun juga perlu menjadi catatan bahwa upaya migran yang selama ini bertahan dengan penguatan sumber daya manusia, lewat lembaga pendidikan tersebut justru telah memberi kontribusi terhadap Orang Asli Papua dengan memberikan akses yang sama terhadap mereka untuk dapat mengecap pendidikan di lembaga pendidikan migran seperti halnya dengan anak-anak migran yang lain.

Dalam bidang politik, dengan otonomi khusus yang mengistimewakan Orang Asli Papua, beberapa posisi jabatan di eksekutif dan di legislatif sesungguhnya masih dimungkinkan untuk dikontestasikan diantara kedua belah pihak. Namun karena kebijakan otsus, kontestasi tersebut menjadi tidak terlalu berbarti

karena afirmasi telah diberikan kepada Orang Asli Papua. Pihak migran sadar diri dan tidak terlalu jauh masuk ke dalam di ranah politik tersebut, meskipun pada setiap saat bila ada kesempatan Pihak Migran masuk dalam arena kancah perpolitikan baik dilegislatif maupun dalam birikrasi pemerintahan.

Upaya mempertahankan diri dari tekanan kebijakan otonomi khusus Papua, kaum migran akhirnya melakukan intensifikasi ikatan-ikatan kedaerahan dengan banyaknya pembentukan paguyuban-paguyuban yang mereka sebut dengan Paguyuban Nusantara yang menjadi nilai tawar secara politik bagi siapa saja yang masuk dalam kontestasi politik seperti pemilihan bupati. Migran membangun soliditas mereka dengan paguyuban tersebut sehingga terjadi semacam adanya mobilisasi modal (*capital*) oleh migran baik modal ekonomi, budaya, simbolik lebih-lebih modal sosial migran yang sejak lama dipupuk dan dipelihara oleh pihak migran sampai terlihat kuatnya solidaritas sosial-politik. Para migran senantiasa mengutamakan keunggulan sumberdaya yang dimiliki, sehingga dalam politik pemerintahan migran lebih siap bila sewaktu-waktu diberi kesempatan untuk menempati posisi-posisi jabatan di pemerintahan setingkat eselon II dan lainnya.

Dalam bidang ekonomi, dengan status Otonomi khusus Papua yang memberikan posisi keistimewaan kepada Orang Asli Papua, juga telah mengakibatkan masyarakat tersegmentasi. Mama-mama Papua yang bergelut dalam dunia usaha mendapatkan akses untuk berusaha dengan fasilitas pasar khusus orang Papua, walau diakui dalam kenyataan tidak dapat dioptimalkan dengan baik karena kondisi yang belum sepenuhnya ada pada kebiasaan orang Papua dari tradisi berburu menjadi peramu. Kaum migran yang secara mandiri berusaha memanfaatkan peluang ini sebagai upaya mempertahankan diri di era otonomi khusus Papua dengan eksplanasi diri yang dapat mengantarkan mereka pada posisi yang tidak dinapikan peran serta mereka dalam kehidupan Papua. Caranya adalah dengan melakukan penguasaan pada sektor-sektor ekonomi informal,

meliputi pedagang kaki lima, transportasi dan jenis usaha yang lainnya dengan cara memperkuat ikatan-ikatan ekonomi keluarga yang berbasis etnis. sembari mendorong usaha-usaha kreatif di bidang yang telah ditekuni selama ini. Dan pada aspek ini pula migran muslim ternyata mampu melihat peluang ekonomi yang ada dengan kesadaran bahwa sebagai orang yang datang ke Papua dan dalam berinteraksi dengan Orang Asli Papua dapat mengambil perang ekonomi secara bersama yang dapat menjaga harmoni di Tanah Papua.

Namun akhir dari seluruh uraian terkait dengan pemberlakuan otonomi khusus Papua dapat ditegaskan kembali bahwa Migran Muslim mampu bertahan karena kemampuan menegosiasiasikan diri di tengah dinamika sosial Papua dengan sikap adaptif terhadap kebijakan otsus Papua juga karena berhasil memperkuat penguasaan ekonomi informal sebagai peran strategis di tengah keistimewaan dan dominasi politik OAP dalam politik, demikian pula migran secara maksimal mengelola hubungan dengan Orang Asli Papua baik pada aspek sosial, ekonomi maupun politik (meskipun basis hubungan berbetuk kontestatif) dan pada aspek ekonomi (hubungan yang harmonis)

8.2. Kontribusi

Era Otonomi Khusus Papua telah memberikan keberpihakan kepada Orang Asli Papua dalam bentuk keistimewaan dalam berbagai hal yang mengakibatkan terjadinya pemilihan kelompok masyarakat yang menjurus kepada penguasaan pada bidang-bidang yang ada baik sosial, politik dan ekonomi. Membuat masyarakat Migran harus mempunyai kemampuan menegosiasiasikan diri di tengah dinamika sosial Papua dengan sikap adaptif terhadap kebijakan otsus tersebut.

Oleh karena hal-hal di atas, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi atau mereduksi implikasi-implikasi kebijakan dari pemberlakuan undang-undang tersebut dan sebagai karya ilmiah disertasi ini mencoba memberi kontribusi antara lain:

1. Secara akademik, disertasi ini merupakan literatur baru dalam kajian politik Islam yang memperlihatkan strategi migran muslim untuk survive dari tekanan akibat kebijakan negara yang menutup akses mereka, meskipun diketahui umat Islam adalah agama mayoritas di Indoensia.
2. Diperlukan evaluasi menyeluruh keberadaan undang-undang otonomi khusus Papua yang selama ini berlaku bagi Provinsi Papua untuk dipertimbangkan kembali yang akan berakhir pada tahun 2021 agar model dalam mengkonstruksi undang-undang yang harus memperhatikan nilai-nilai dan kearifan-kearifan lokal dan religiusitas, baik penduduk setempat maupun kelompok migran, agar harmoni dalam masyarakat dapat terpelihara.
3. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sikap dan posisi sebagai fasilitator bagi seluruh warga. Perlu menyadari bahwa tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang terpenting adalah menjaga integritas sebagai sebuah bangsa yang bersatu. Wujud dari pelaksanaan hal tersebut di atas adalah dengan lebih serius mengelola Kabupaten Jayapura sebagai “Zona Integritas Kerukunan “ sebagai *role of model* di Papua yang telah dicanangkan pada tahun 2016 silam.
4. Mengenai sikap menahan diri, ada yang patut diapresiasi dari masyarakat migran. Walaupun berada dalam keadaan disubordinasi. Akan tetapi dalam konteks hubungan sosial, mereka berusaha menekan harga diri dan mengedepankan sikap menahan diri dalam banyak aspek. Sikap seperti ini dapatlah dikatakan sebagai upaya mengembangkan nilai-nilai baru yang perlu direspon secara positif oleh semua pihak. Kasus migran muslim di Kabupaten Jayapura merupakan contoh yang baik bagi penanaman nilai-nilai kebangsaan sebagai bentuk nasionalisme, karena walau pun mendapatkan diskriminasi melalui UU, namun migran muslim tidak

melakukan konfrontasi kepada negara. Hal ini sekaligus memperlihatkan bagaimana perbedaan-perbedaan sosial dapat dikonstruksi dan dikelola sebagai sebuah kekuatan dalam membangun kebersamaan.